

Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program *Smart City* di Kota Bandung

Deni Fauzi Ramdani¹, Fikri Habibi²

¹Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Serang Raya

²Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Serang Raya

Jl. Raya Serang – Cilegon KM.05 (Taman Drangong), Serang – Banten

E-mail: denifauziramdani@gmail.com¹, fikrihabibi81@gmail.com²

ABSTRAKS

Penguatan partisipasi dilakukan dalam mendorong program smart city kota bandung supaya masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan. Terobosan Pemkot Bandung dalam penguatan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan derajat partisipasi kearah kontrol masyarakat sebagai level partisipasi paling tinggi. Pemkot Bandung membangun partisipasi dengan tiga kunci dalam melakukan penguatan partisipasi adalah dengan kolaborasi, desentralisasi dan inovasi. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mempunyai tanggung jawab dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Inovasi paling penting dalam menghadapi era digital/milenial dengan melakukan perubahan partisipasi yang lebih kasual dan egaliter. Semua masyarakat mendapatkan akses dan bisa terlibat langsung berpartisipasi dengan pemkot dalam pembangunan

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, smart city, kontrol masyarakat

1. PENDAHULUAN

1.1 Urgensi Partisipasi Masyarakat

Sejarah menunjukkan bahwa zaman orde baru berkuasa intervensi dan dominasi pemerintah sangat mewarnai kebijakan yang rentan memberikan celah dalam penyelewengan dan ketidak efektifan pembangunan. Berdasarkan semangat yang dibawa dalam perubahan rezim yang dinamai orde reformasi telah terjadi pergeseran model pemerintah daerah menuju desentralisasi untuk mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal. Dalam model ini jelas menghendaki penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat (Muluk, 2017). Partisipasi menjadi prinsip utama karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan.

Ini merupakan terobosan penting pemerintah saat ini dan sesuai dengan prinsip *good governance* yang memberikan ruang yang jelas kepada seluruh elemen masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri. Sehingga pembangunan tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Prinsip bertujuan mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis yang membawa pemerintah daerah menjadi berhasil menjalankan tata kelola pemerintahannya. Tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat akan berujung pada tingkat keberhasilan pencapaian program-program yang akan dijalankan pemerintah.

Saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah mengembangkan konsep *Smart City*. Konsep kota cerdas ini mengetengahkan sebuah tatanan kota yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara tepat dan cepat (Plimbi, 2014). Namun belum semua masyarakat

Bandung menjadi bagian pemerintah dalam merumuskan berbagai masalah yang ada di Kota Bandung.

Walikota Bandung Ridwan Kamil sangat serius dalam mengembangkan konsep *smart city*. Terbukti dalam setiap kebijakan mengarah pada program smart city yang sudah dirancang sejak awal. Pendekatan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil yang sering disampaikan dalam berbagai forum dengan istilah kolaborasi, desentralisasi dan inovasi.

Ketiga hal ini merupakan langkah-langkah Ridwan Kamil dalam menjalankan program *smart city* di Kota Bandung yang menggambarkan perubahan dan kebaruan. Kolaborasi menandakan butuhnya peran pihak lain baik masyarakat maupun swasta atau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembangunan Kota Bandung. Sementara desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pembangunan kepada level pemerintahan dibawahnya baik secara pelayanan administrative maupun penggunaan anggaran. Sedangkan inovasi adalah proses peningkatan pelayanan berbasis teknologi.

Proses kolaborasi dan desentralisasi memerlukan peran partisipasi masyarakat supaya sukses membangun Kota Bandung dengan konsep *smart city*. Istilah Kota Cerdas ini bukan hanya proses digitalisasi tetapi yang paling utama adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Proses keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah secara terbuka sebenarnya sudah dilakukan pada periode kepemimpinan Ridwan Kamil, penilaian tersebut disampaikan melalui social media yaitu *Facebook* dan *Twitter*, namun demikian

penilaian yang dilakukan tidak terukur. Maka perlu ada terobosan yang bisa membuka peluang secara terukur dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat sehingga mendorong peningkatan kinerja aparatur ASN menjadi lebih baik.

Kota Bandung berkonsep *Smart City* tidaklah mudah, sehingga dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh Mursalin (2016) *pertama*, terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandung belum menyeluruh sehingga masyarakat belum mendapatkan akses informasi yang komperhensif. Masyarakat belum seluruhnya melek tehnologi. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu tehnologi bahkan jarang mengakses internet maupun media lainnya sehingga infoemasi tidak tersampaikan.

Permasalahan *Kedua* adalah belum semua aparatur birokrasi memahami roadmap smart city yang di canangkan oleh Ridwan Kamil sehingga menghambat keefektifan dalam memenuhi langkah-langkah program smart city. Permasalahan selanjutnya adalah infrastruktur yang masih terbatas belum sepenuhnya masyarakat bisa mengakses semua program yang dijalankan oleh Pemkot Bandung.

Partisipasi merupakan bagian dari penerapan prinsip *good governance* dalam sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Maka setiap penyelenggaraan pemerintah harus menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dimana masyarakat diberikan ruang partisipasi yang luas untuk ikut merencanakan pembangunan kotanya.

Pada Era digitalisasi yang semakin terbuka dalam melakukan interaksi sosial membuka ruang peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan kota Bandung. Maka tulisan ini akan merumuskan masalah bagaimana partisipasi yang bisa mendorong program *smart city*.

1.2 Landasan Teori

Salahsatu unsur penting dalam pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Maka pemerintah dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disampaikan bahwa pendekatan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan pendekatan Politis, Teknokratis, *bottom up-topdown* dan partisipasi. Aturan tersebut dengan tegas menjamin peran serta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun saat ini masih terlihat secara operasional proses forum musyawarah pembangunan (musrenbang) terlihat ritual prosedural tidak betul-betul aspirasi yang dibawa oleh masyarakat langsung.

Partisipasi tidak saja menjadi instrumen dan tujuan, namun juga menjadi inti dari program pemberdayaan masyarakat. Menurut Plummer (2000) dikutip dalam Adiyoso (2009) partisipasi dalam konteks pengembangan kapasitas masyarakat selain mendapat fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan

kebutuhan juga diharapkan infrastruktur yang dibangun dapat terjamin karena masyarakat merasa memiliki karena sudah ada keterlibatan.

Partisipasi dalam arti luas bisa sebagai *involvement* dan *empowerment*. Partisipasi dapat terjadi kalau pemerintah membuka ruang demokrasi kepada masyarakatnya. Partisipasi juga harus masuk pada setiap proses kebijakan dari mulai formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi public sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh penguasa karena kemurahan hatinya, tetapi lebih dari itu partisipasi dapat diartikan sebagai layanan dasar dan terintegasi dari model pemerintahan *good governance* masyarakat sebagai *citizen-centered government* (Muluk, 2007).

Rekonsepsi istilah partisipasi penting untuk dilakukan karena selama ini partisipasi hanya dinilai cakupan dan ruang lingkupnya lebih pada perspektif politik dan demokrasi saja. Padahal partisipasi sudah berkembang luas menjadi sebuah model pemberdayaan masyarakat yang punya peran aktif menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Didalam tangga partisipasi Arnstein (1969) yang dikutip oleh Adiyoso (2009) menjelaskan adanya tangga partisipasi yang memperlihatkan tingkat keterlibatan masyarakat dari tahapan partisipasi yang paling rendah hingga partisipasi yang paling tinggi. Ada delapan tangga partisipasi Arnstein yang dikelompokkan pada tiga jenis yaitu: *pertama*, non partisipasi (*non participation*) yang terdiri dari manipulasi dan therapy. Manipulasi merupakan partisipasi yang digerakan oleh orang luar bukan masyarakat sendiri. Sedangkan terapi partisipasi dimana masyarakat dianggap sebagai "penderita" yang harus percaya kepada dokter yang mengobatinya. Kedua tahapan partisipasi ini sebenarnya tidak ada sama sekali partisipasi masyarakat karena bukan masyarakat yang menggerakannya.

Kedua, Imbalan/Hadiah (*Tokenism*), yang terdiri dari informasi atau informing, konsultasi atau *consultation*, dan penentrangan *placation*. Informasi merupakan partisipasi yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tentang program-program yang akan dijalankan ataupun yang sudah dijalankan yang hanya satu arah. Sedangkan konsultasi, informasi yang sudah disampaikan dua arah meskipun terbatas. Selain itu, penentrangan adalah partisipasi yang dilakukan melibatkan para wakil masyarakat dalam setiap kegiatan namun keputusan tetap ada pada pemerintah.

Ketiga, Kedaulatan rakyat (*citizen power*), yang terdiri dari: Kemitraan atau *Partnership*, pendelegasian atau *power delegation* dan partisipasi yang paling kuat adalah *citizen control*. Kemitraan merupakan partisipasi yang memberikan ruang sama derajatnya antara pemerintah dengan masyarakat dimana keduanya bisa saling memberi masukan. Pendelegasian pemerintah sudah memberikan sebagian kepercayaan kepada masyarakat untuk

mengambil keputusan. Tangga partisipasi yang paling tinggi adalah ketika masyarakat sepenuhnya memiliki control dan mengambil keputusan secara mutlak.

Tabel 1.1 Tangga Partisipasi Arnstein

No	Jenis	Kategori
1	<i>Manipulation</i>	<i>Non Participation</i>
2	<i>Therapi</i>	
3	<i>Informing</i>	
4	<i>Consultation</i>	<i>Tokenisme</i>
5	<i>Placation</i>	
6	<i>Partnership</i>	<i>Citizen Power</i>
7	<i>Delegate Power</i>	
8	<i>Citizen Control</i>	

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memberikan gambaran proses partisipasi masyarakat di Kota Bandung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*).

Metode yang digunakan kali ini dengan studi kasus dari Penguatan partisipasi masyarakat kota Bandung dalam mendorong program smart city. Karena itu studi kasus bersifat naturalistik atau alamiah. Menurut Yin, suatu inkuri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, apabila batas – batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan dimana menggunakan multisumber bukti yang dimanfaatkan (Yin, 2002). Tujuan dari studi kasus sendiri mempelajari secara intensif tentang latar belakang menggunakan multisumber .

Studi kasus juga mengharuskan adanya *bounded* (batasan) untuk menggali lebih mendalam satu penelitian yang hendak digali. Dalam hal ini kami mengambil data tentang pergeseran partisipasi public yang terjadi saat ini yang bisa mendorong program Pemkot Bandung bisa terealisasi dengan baik. Penelitian ini, penulis berusaha memotret peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya kemudian dilukiskan sebagaimana adanya. Masalah yang diteliti adalah masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu dan belum tentu relevan jika digunakan dimasa yang akan datang.

3. PEMBAHASAN

Praktek partisipasi sebagai bagian dari dinamika sosial dan ini merupakan bagian dari cara penulis melihat potret adanya hal yang menarik untuk dikaji yang bisa berkontribusi pada proses perubahan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah secara cepat, tepat dan terarah. Untuk memperoleh pemahaman tentang efektivitas partisipasi masyarakat, pembahasan berikut ini berupaya

menarik kesimpulan atas pemaparan mekanisme partisipasi yang dilakukan oleh Pemkot Bandung.

3.1 *Citizen Power* Sebagai Basis Partisipasi

Sejak awal kepemimpinan Ridwan Kamil menginginkan adanya perubahan yang bisa .merubah gaya kepemimpinan mempraktekkan *leadhershship in the middle* yaitu pola kepemimpinan ditengah banyak turun ke lapangan mengajak birokrasi berubah, kedua melakukan segala hal dengan *going digital* melawan segala penyimpangan termasuk korupsi dengan mengurangi interaksi langsung dalam melakukan perijinan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga ada ratusan aplikasi dalam rangka *going digital* sehingga pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan .

Ridwan Kamil mempunyai prinsip untuk melakukan perubahan ada empat hal yang dipegang yaitu pemerintah dengan *political power*, *civil society* dengan *social power*, pebisnis dengan *capital power* dan media dengan *information power*. Semua itu kalau efektif dikerahkan semuanya untuk ikut berpartisipasi membangun Kota Bandung bisa lebih baik. Terutama dalam membangun *civil society* sebagai sumber kekuatan sosial. Kekuatan social ini erat kaitanya dengan bagaimana kepemimpinan di Kota Bandung bisa menghimpun dengan konsep partisipasi. Ada tiga kunci utama dalam membangun partisipasi yang mengarah pada level *Citizen Power* dimana kategori tersebut sudah pada level partisipasi yang tinggi dimana masyarakat sendiri bisa menilai, mengontrol dan mengawasi, yaitu melakukan dengan semangat Kolaborasi, Desentralisasi, dan Inovasi.

Pertama, semangat kolaborasi adalah kunci dalam berbagi baik ide maupun materi semua unsur harus aktif terlibat dalam pembangunan di Kota Bandung. Maka setiap ada program yang harus melibatkan partisipasi masyarakat selalu dilakukan dengan cara terbuka. Semua pihak boleh ikut dan aktif terlibat. Ridwan Kamil mencontohkan pada waktu adanya kegiatan memperingati Konferensi Asia Afrika Pemkot membuka kepanitiaan agar terlibat aktif untuk membantu suksesnya acara tersebut caranya dengan mendaftarkan diri secara online. Ada sekitar 11000 yang mendaftarkan diri padahal yang dibutuhkan hanya 3000 orang saja. Kalau melihat tingkat antusiasme masyarakat untuk ikut sangat tinggi.

Kedua, semangat desentralisasi memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih mandiri untuk pembangunan sampai pada level RW pun Pemkot memberikan anggaran yang cukup besar untuk dikelola sebesar Rp 100 juta (jabar.tribunnews 19 februari 2016). Anggaran ini dimaksudkan agar tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi dalam pembangunan.

Ketiga, adalah semangat berinovasi ini erat kaitannya dengan dua kunci sebabnya karena inovasi ini harus menempel pada masing-masing peran sehingga tercipta partisipasi yang efektif. Inovasi ini

dilakukan supaya setiap program yang dilakukan untuk mengarahkan pada konsep *smart city* dengan karakteristik masyarakat di era milenial. Satu contoh yang dilakukan oleh Pemkot adalah membuka ruang partisipasi secara terbuka kepada masyarakat untuk merespon setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Akses itu dibuka melalui media social yang sudah terkoneksi dengan dinas-dinas dan walikota Bandung.

Seperti kita ketahui walikota Bandung sangat aktif di media sosial. Hal itu disampaikan merupakan strategi untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Maka hasilnya 90 persen komplek masyarakat bisa terselesaikan dengan baik (mata Najwa, 9 maret 2016).

3.2 Modifikasi Partisipasi di Era Milenial

Penguatan partisipasi dalam mendorong program *smart city* dilakukan oleh Pemkot Bandung disesuaikan dengan zamannya. Era milenial merujuk pada era dimana masyarakat sudah semakin terbuka dan secara politis generasi ini adalah kelompok yang berusaha mengambil resiko politik yang kecil di ruang public tidak mau terlibat konflik secara terbuka di ruang publik tetapi terlibat sengit di dunia maya.

Populasi generasi milenial cukup menarik jika dikaji lebih komperhensif seperti yang dilakukan Wasisto Raharjo peneliti LIPI yang melakukan riset tentang politik kelas menengah. generasi milenial mereka terlahir tanpa ikatan emosi sejarah dengan peristiwa politik sebelumnya sehingga membentuk pandangan politik yang independen. Kelebihannya mereka adalah generasi reaktif yang dengan cepat menyerap segala sumber informasi berkat adanya teknologi dan berusaha untuk adaptif dalam setiap dinamika zaman. Maka faktor informasi menjadi identitas baru kalangan milenial ini karena melalui kepemilikan informasi dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi di ruang publik.

Maka perlu ada modifikasi penting dalam partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang kepada generasi milenial. Ruang-ruang partisipasi yang tadinya cenderung formalistik dan struktural melalui Musrenbang dan lainnya. kini harus dilakukan lebih kasual dan egaliter.

Seperti yang dilakukan Ridwan Kamil dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung memberikan ruang partisipasi lebih lebar kepada generasi milenial. Penggunaan teknologi digital dalam setiap mengambil keputusan. Misalnya dalam menuangkan ide/gagasan mengenai program-program Ridwan Kamil membuat "Sayembara" kepada semua pengguna internet untuk menyumbangkan ide pembangunan di Kota Bandung. Hasilnya ada 300 orang memberikan sumbangan ide yang menjadi pertimbangan pembangunan. Pada akhirnya ada beberapa orang terpilih yang dipanggil dan diberikan waktu lebih lama untuk menjelaskan gagasannya.

Selain itu Pemkot Bandung melakukan penilaian kinerja bisa dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Aplikasi ini merupakan salahsatu sistem informasi penilaian yang bisa mewadahi partisipasi masyarakat untuk menilai kinerja layanan yang dilakukan kecamatan di Kota Bandung (Sagita, 2016).

Pada aplikasi ini terdapat dua kriteria penilaian yaitu *pertama*, kriteria penilaian warga terhadap kinerja kecamatan meliputi ketertiban, keindahan, kebersihan, indeks kebahagiaan, dan ngabundungan. *Kedua*, mengenai kualitas pelayanan yang diberikan dan rata-rata waktu pelayanan. Hasil penilaian warga masyarakat tersebut menjadi bahan penilaian walikota untuk memberikan rapor kecamatan.

4. KESIMPULAN

Penguatan Partisipasi masyarakat di pemerintahan Kota Bandung dalam mendorong program *smart city* dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan upaya level *control power*, dimana masyarakat berhak penuh mengontrol dan menilai setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.

Tiga kunci yang dilakukan oleh pemkot Bandung dalam melakukan penguatan partisipasi adalah dengan kolaborasi, desentralisasi dan inovasi. Tiga kunci ini dilaksanakan agar masyarakat mempunyai tanggung jawab dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung.

Terobosan yang paling penting dalam menghadapi era digital/milenial dengan melakukan perubahan partisipasi yang lebih kasual dan egaliter. Semua masyarakat mendapatkan akses dan bisa terlibat langsung berpartisipasi dengan Pemkot dalam pembangunan

PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.
- Hiyatullah, Syarif. 2016. *Internet of Things Bandung Smart City* (<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji/article/view/814>, diakses 12 November 2017)
- <http://www.plimbi.com/news/158601/smart-city-konsep-cerdas>
- Muluku, Khairul. 2009. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing
- Mursalim, Siti Widharretno. 2017. *Jurnal Ilmu Administrasi, Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung* (Online), (<http://stalianbandung.ac.id/ojs/index.php/jia/article/view/1> diakses 12 November 2017).

- Plimbi, E. 2014. Smart City, Konsep Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan di Indonesia. Retrieved from plimbi.com
- Sagita, Indrawati, Novie. 2016. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Penilaian Kinerja di Kota Bandung* (online) (<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10009>)
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.